

volume
2-2019

**THE QUALITY OF TEACHER COMPETENCE
AND DISPARITY BASED ON TERRITORY**

Research on Equity and Quality in Education



DATA GURU DI 12 KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN KLASIFIKASI KOTA MAJU, KOTA MENENGAH DAN DAERAH TERTINGGAL

A. Pendahuluan

Data Guru tahun ajaran 2017/2018 diseluruh Indonesia berjumlah 317.009¹ orang yang diklasifikasi dalam pendidikan dasar (SD) sejumlah 96.056, Sekolah Menengah Pertama 116.334, Sekolah Menengah Atas 55.395 dan SMK 49.224, data jumlah guru ini terdapat pada sekolah negeri dan swasta. Data tersebut bukanlah satu-satunya data yang bisa dijadikan rujukan, jika dilihat data dari laman neraca pendidikan nasional 2018 maka terdapat perbedaan data, dimana jumlah keseluruhan guru di Indonesia sebanyak 2.769.203 orang, dengan klasifikasi: Guru PAUD berjumlah 252.488, Guru SD sejumlah 1.313.387, Guru SMP sejumlah 590.786, Guru SMA sejumlah 295.208, Guru SMK sejumlah 293.339, dan guru SLB sejumlah 23.995². ketidak samaan data ini merupakan problem dasar yang harus diurai.

Dalam tulisan ini akan digunakan basis data pada neraca pendidikan nasional yang termuat pada laman <https://npd.kemdikbud.go.id/>, data ini menjadi basis analisis.

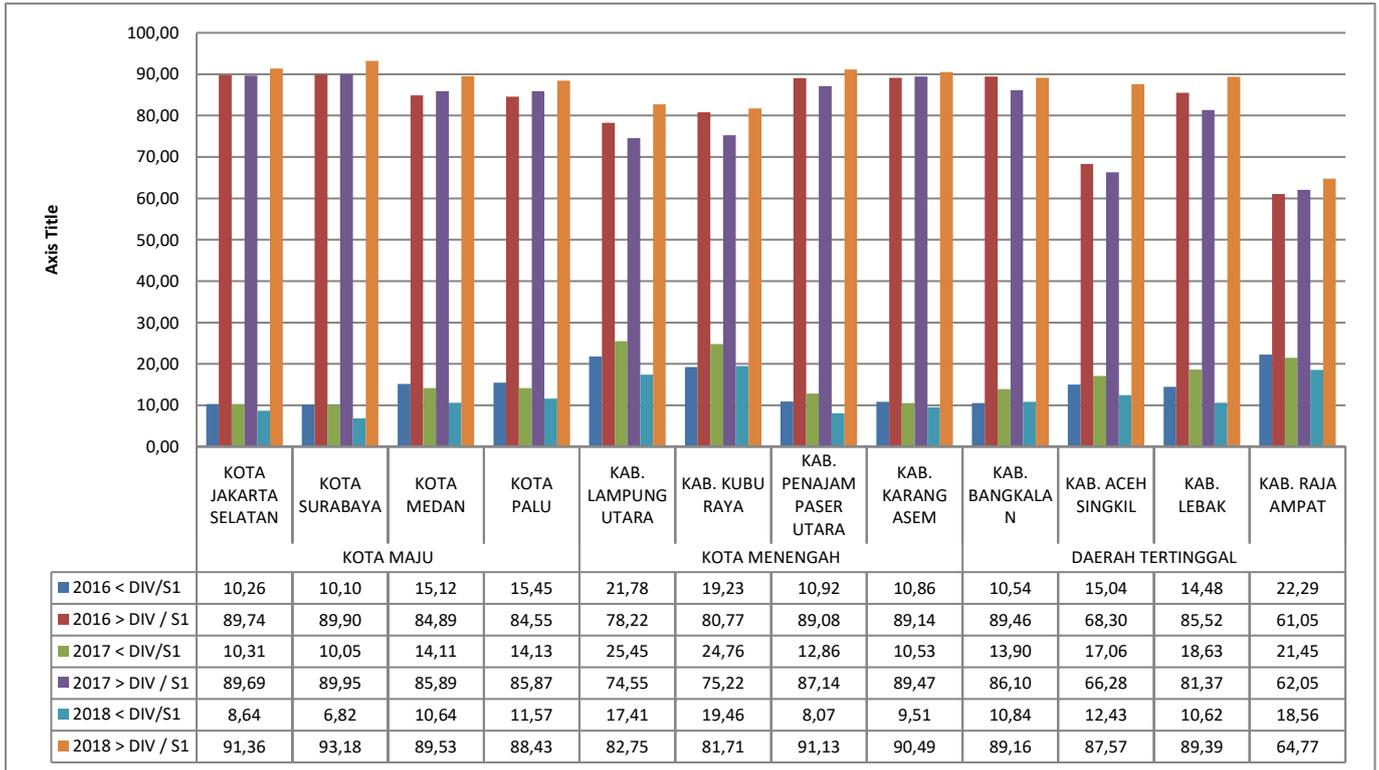
B. Kualifikasi Guru

Isu kualifikasi guru ini bukanlah baru karena pemerintah melalui standar nasional pendidikan menjabarkan salah satunya tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, kompetensi yang dimaksud meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. Berikut data kualifikasi guru jika dilihat dari pembagian 3 (tiga) varian daerah, yaitu kota maju, kota menengah dan daerah tertinggal.

¹ Statistik.data.kemdikbud.go.id

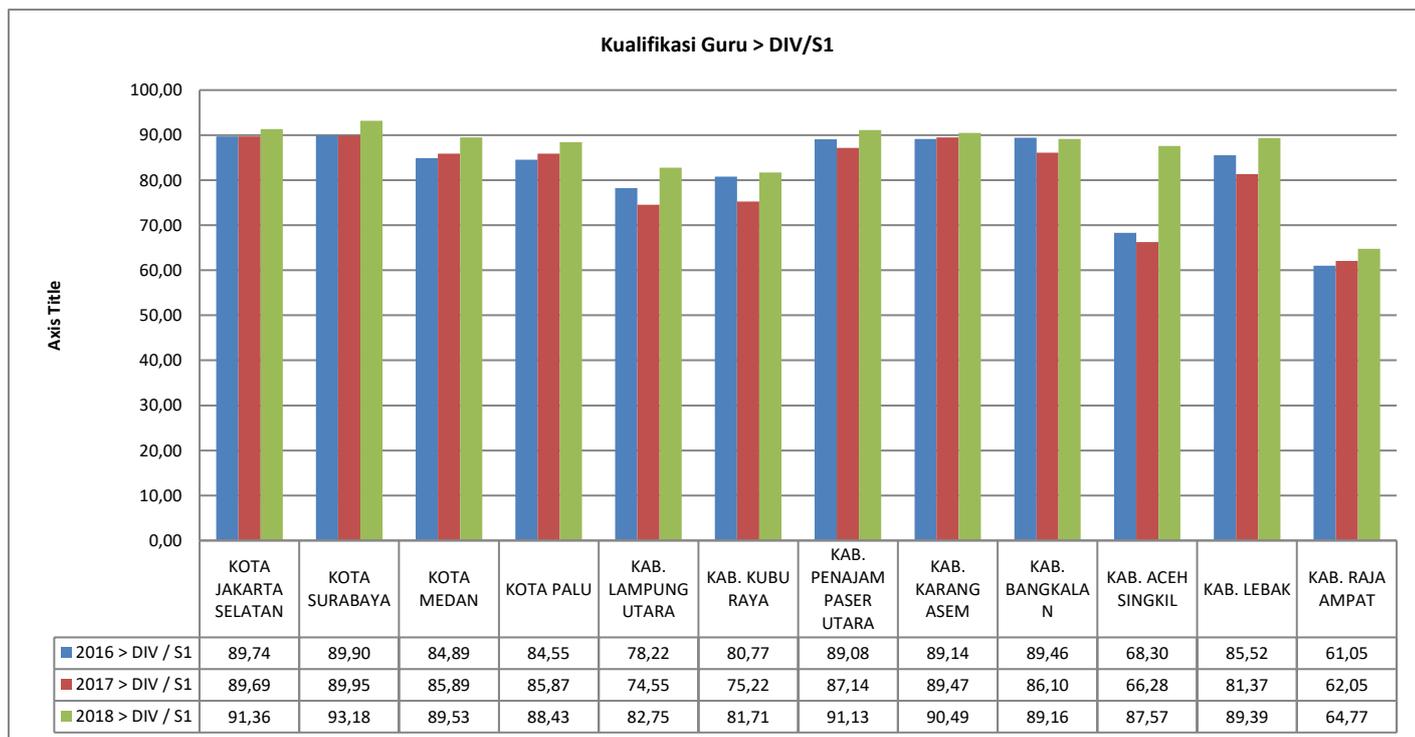
² <https://npd.kemdikbud.go.id/>

Grafik 1.1
Kualifikasi Guru



Grafik diatas menggambarkan adanya perbedaan kualifikasi pendidikan pada guru di kota maju, guru di kota menengah serta guru di daerah tertinggal. Guru di Kota maju seperti Jakarta dan Surabaya dari tahun 2016 – 2018 sangat sedikit yang berpendidikan dibawah DIV/S1 atau tidak lebih dari 11% dari jumlah guru yang ada di daerah tersebut, sedangkan pada kota menengah seperti lampung utara dan kubu raya masih banyak memiliki guru yang tingkat pendidikannya di dibawah DIV/S1 atau 19% dari jumlah guru yang ada di daerah tersebut. Ketimpangan atas kualifikasi guru antara kota maju dengan kota menengah ini menandakan timpangnya distribusi guru di Indonesia. Untuk kualifikasi guru yang kurang lebih dari DIV sendiri terdapat

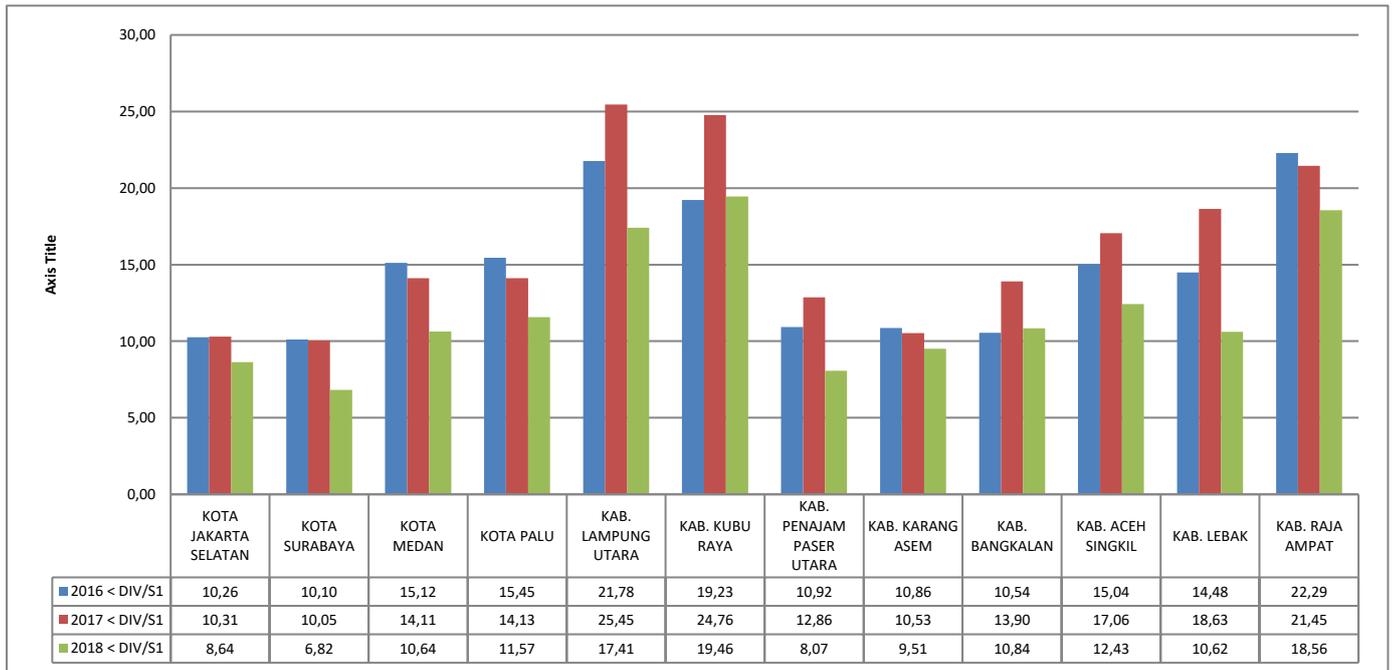
**GRAFIK 1.2
KUALIFIKASI GURU > DIV/S1**



Grafik ini memotret adanya ketimpangan guru yang berkualifikasi pendidikan lebih dari DIV/S1, terlihat dari empat kota maju di Indonesia seperti Jakarta selatan, Surabaya, medan dan palu memiliki distribusi guru yang baik yaitu rata-rata diatas 85%, dibandingkan dengan kota menengah dan daerah tertinggal yang tidak mencapai rata-rata seperti kota maju, atau sekitar 70%. Khusus daerah tertinggal yang jauh dari ibu kota Negara seperti aceh singkil dan raja ampat memiliki rata-rata pendidik yang berkualifikasi DIV/S1 keatas dibawah 70%, ini menandakan ada lebih kurang 40% guru yang berkualifikasi dibawah DIV/S1.

Selain itu terdapat juga kualifikasi guru yang pendidikannya dibawah DIV/S1, data ini dapat dilihat seperti grafik dibawah ini:

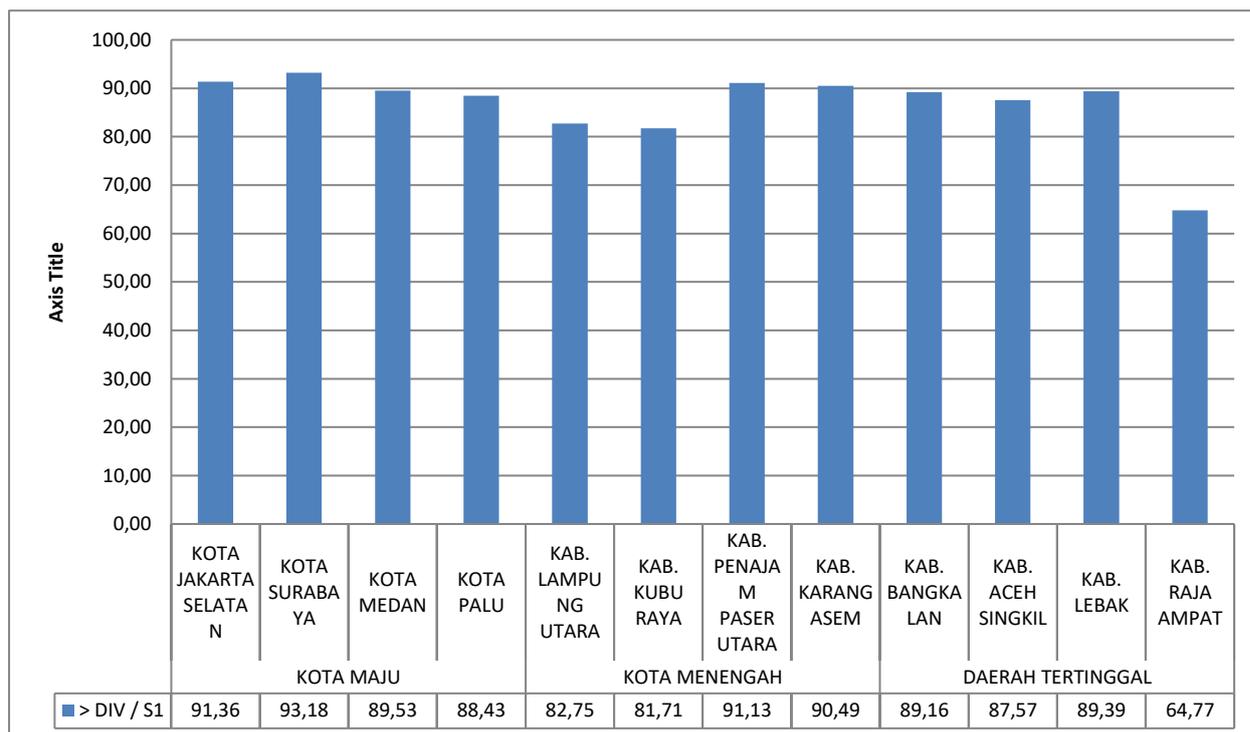
GRAFIK 1.3
KUALIFIKASI GURU < DIV/S1



Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah guru yang berkualifikasi kurang dari DIV/S1 setiap tahun selama 2016 – 2018, daerah yang mengalami penurunan paling banyak adalah kabupaten lampung utara sebesar 8,04% baru disusul kabupaten lebak sebesar 8,02% sedangkan kota-kota maju mengalami penurunan sangat sedikit berkisar 3,48% yang dialami kota medan. Penurunan guru berkualifikasi kurang dari DIV/S1 ini sejalan dengan peningkatan guru lebih dari DIV/S1, dimana mengalami peningkatan 8% lebih untuk lampung utara dan lebak, begitupun juga yang lainnya. Kecuali aceh singkil yang mengalami kenaikan 21,29% sedangkan penurunannya 4,63%.

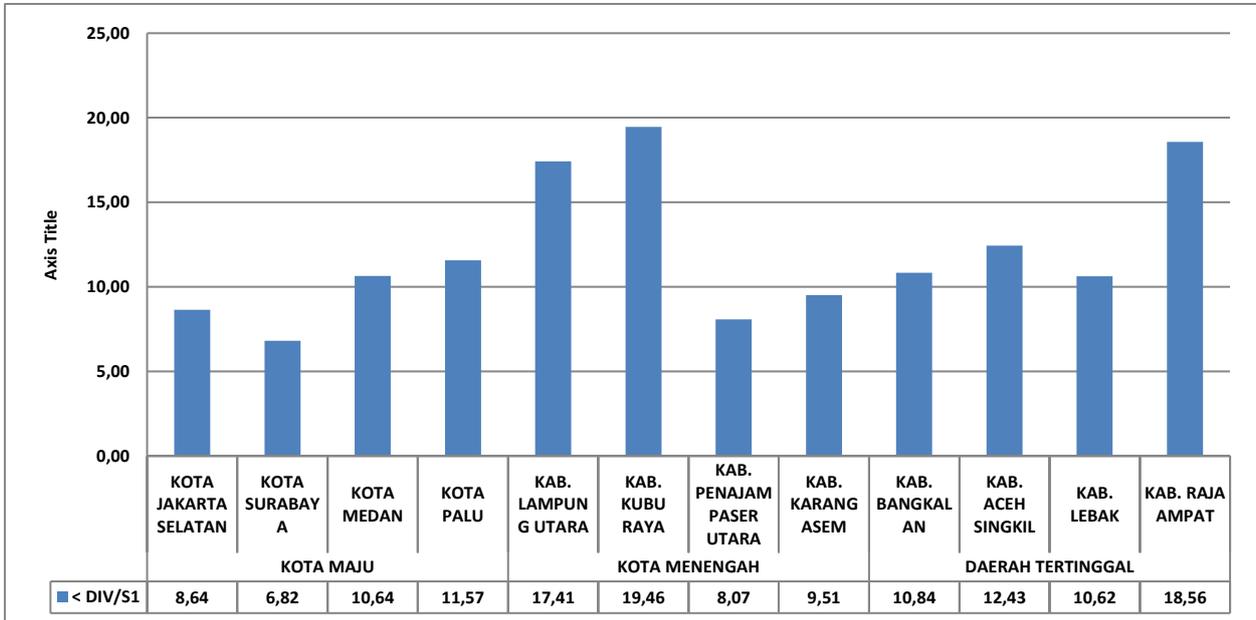
Agar data bisa dibaca secara spesifik, maka disajikan data per tahun, data ini diambil hanya untuk tahun 2018. Berikut data kualifikasi guru kurang dari DIV/S1 pada tahun 2018, seperti pada grafik berikut ini:

Grafik 1.4
KUALIFIKASI GURU (> DIV/S1) 2018



Data diatas menunjukkan dari dua belas kabupaten/kota yang diklasifikasi dalam kota maju, kota menengah dan daerah tertinggal menggambarkan bervariasinya kualifikasi guru, untuk kota maju dan kota menengah memiliki guru yang berkualifikasi lebih besar dari DIV/S1 yang baik sedangkan untuk daerah tertinggal memiliki kualifikasi dibawahnya, seperti kabupaten raja empat yang hanya memiliki guru 64,77% berkualifikasi diatas DIV/S1. Untuk mengecek data tersebut, disajikan data kualifikasi guru dibawah DIV/S1, seperti grafik dibawah ini:

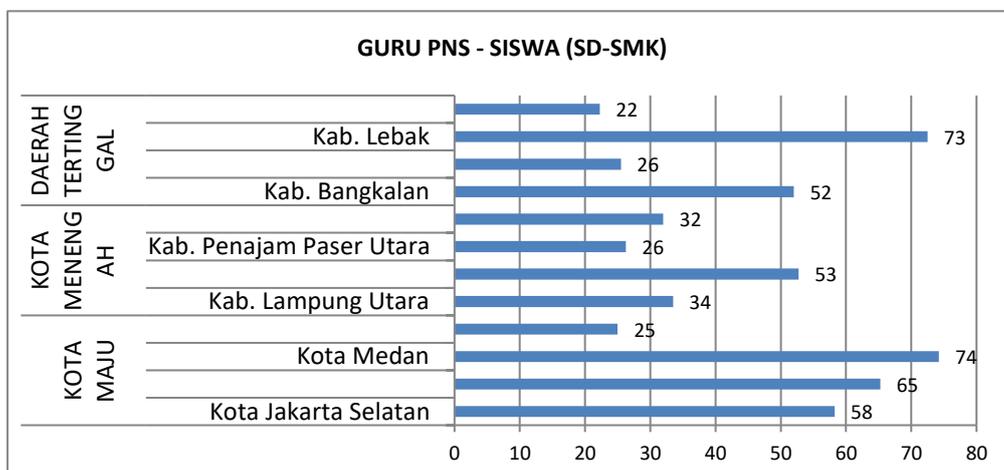
Grafik 1.5
KUALIFIKASI GURU (< DIV/S1) 2018



Grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, kualifikasi guru yang pendidikannya dibawah DIV/S1 pada kota maju, kota menengah dan daerah tertinggal mengalami ketimpangan, lebih dari 10% guru yang berpendidikan kurang dari DIV/S1 berada pada kota menengah yaitu kubu raya dan lampung utara, sedangkan daerah tertinggal yaitu kabupaten raja ampat. Data ini mengkonfirmasi data sebelumnya yang memuat kurangnya guru yang bequalifikasi diatas DIV/S1.

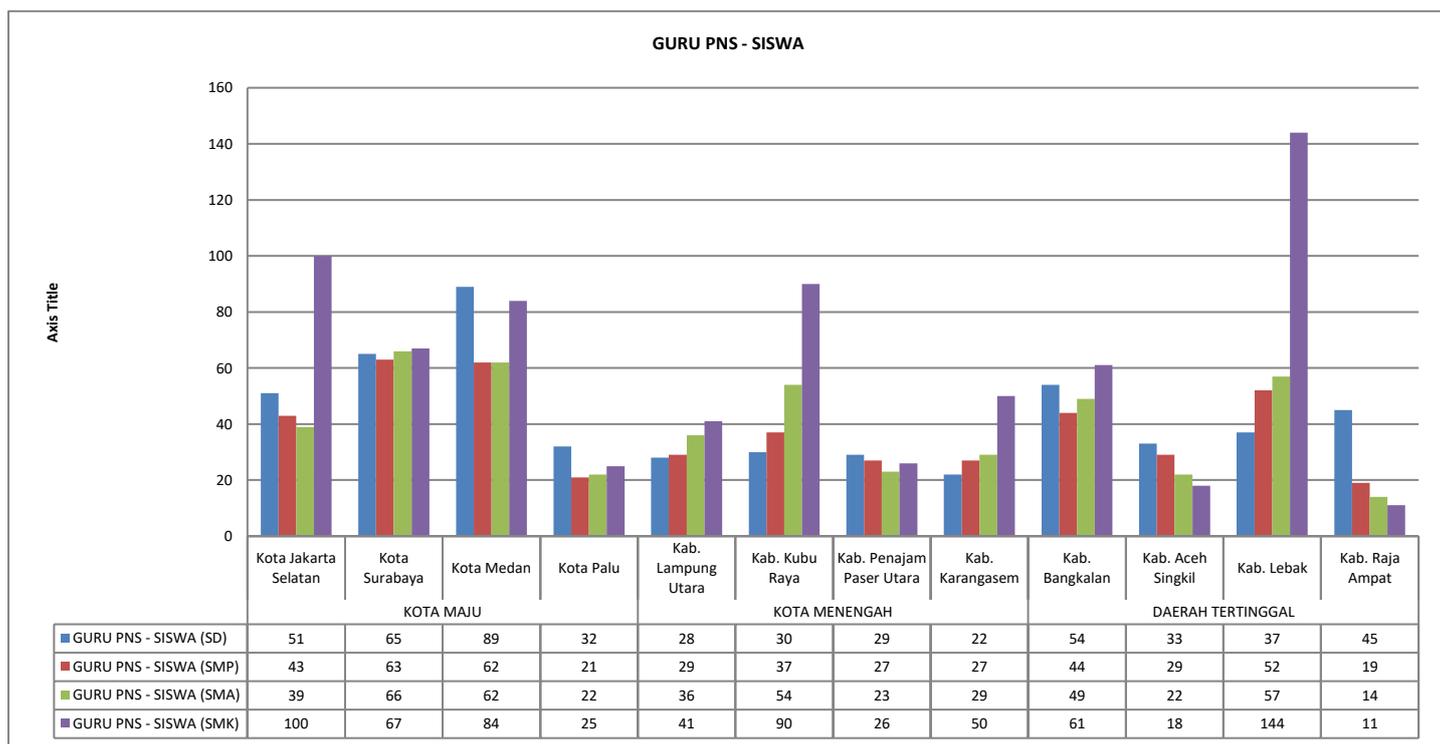
Selain data kualifikasi guru juga disajikan data rasio pendidikan di dua belas kabupaten/kota pada tahun 2018, data ini menjawab ketimpangan rasio guru dan siswa seperti grafik dibawah ini:

Grafik 1.6
Data Rasio Pendidikan Tahun 2018



Untuk grafik Ratio pendidik khusus Guru PNS dengan Siswa semua level (SD-SMA/SMK) tergambar bahwa justru dikota-kota maju memiliki ratio yang timpang, seperti dikota medan dimana satu guru mengawal 74 siswa, dikota Jakarta selatan satu guru mengawal 58 siswa, untuk kota menengah tidak terlalu sebanyak kota maju dimana pada kab. Kubu raya satu guru megawal 53 siswa, atau seperti di karangasem bali satu guru mengawal 32 siswa, sedangkan di empat daerah tertinggal yang memiliki rasio paling buruk adalah kabupaten lebak dimana satu guru PNS mengawal 73 siswa. Rasio guru PNS ini tidak bisa jadi cerminan rasio guru keseluruhan karena bisa jadi terdapat guru non PNS. Pemerintah daerah cenderung memanfaatkan guru non PNS untuk membantu kegiatan belajar mengajar yang tidak mampu tertangani oleh guru PNS. Berikut disajikan Ratio secara spesifik guru PNS dengan siswa berdasar tingkat pendidikan seperti pada grafik dibawah ini:

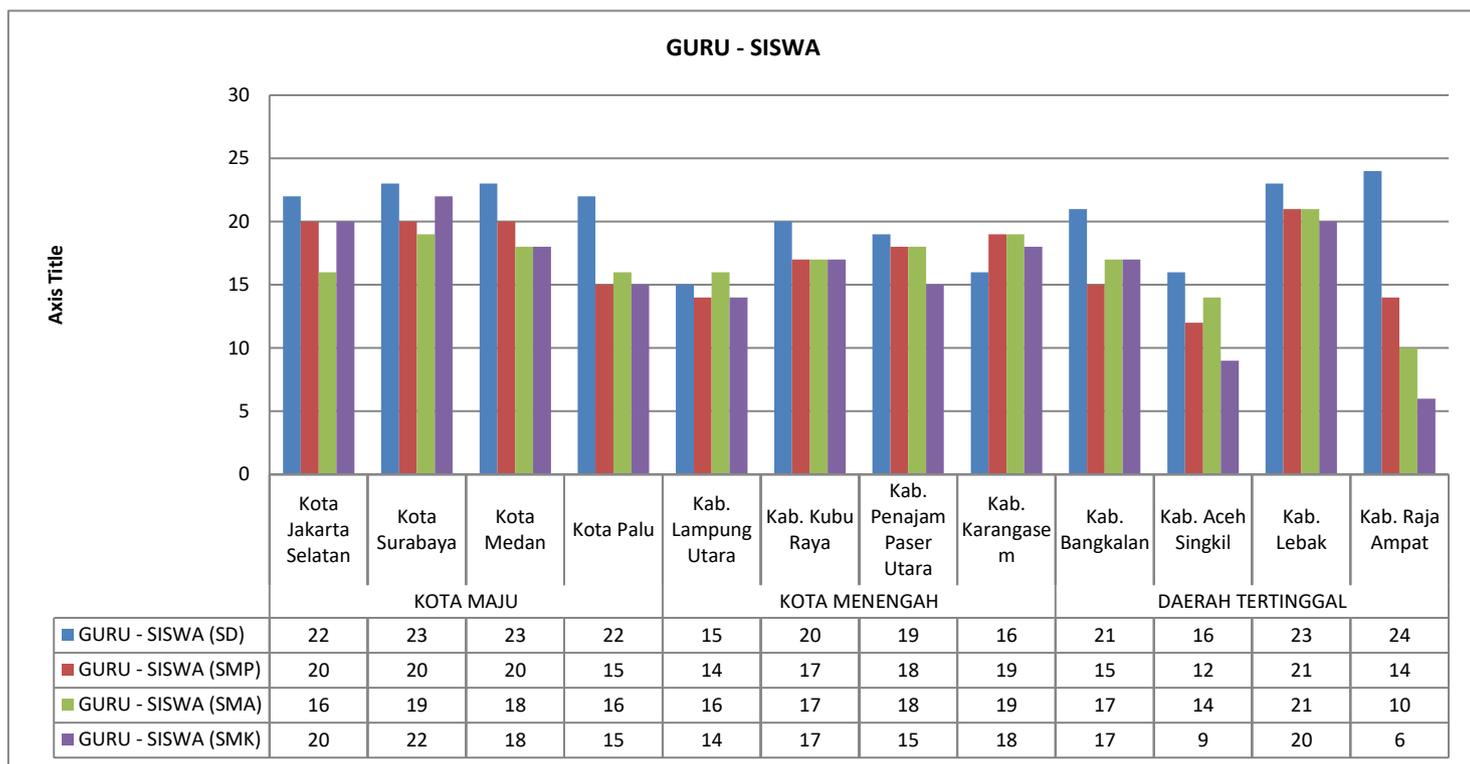
**GRAFIK 1.7
SPESIFIKASI GURU PNS – SISWA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**



Grafik diatas menunjukkan bahwa ratio secara spesifik guru PNS dengan siswa itu sangat buruk, banyak daerah yang besar rasionya seperti tiga kota maju, bisa jadi ini akibat kebijakan merekrut guru non pns atau guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) seperti yang diamanatkan UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara.

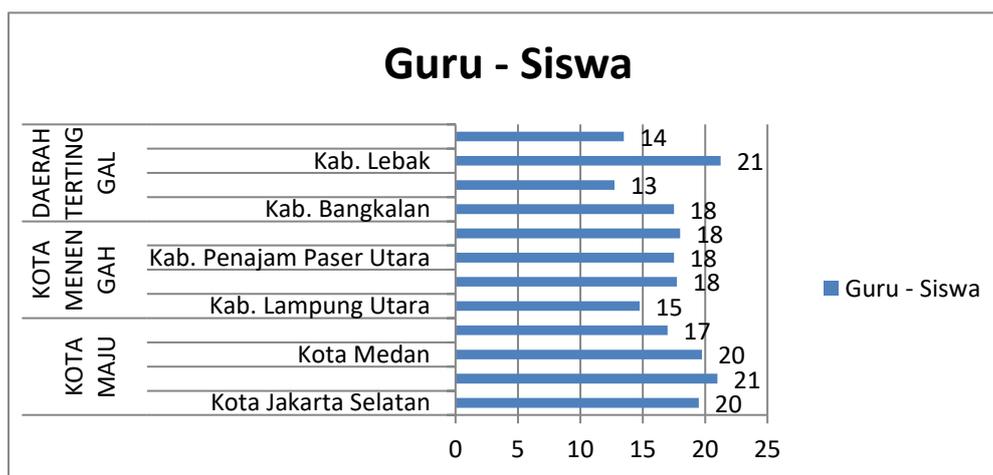
Namun yang cukup tercengang justru rata-rata guru PNS pada tingkat pendidikan SMK rasionya sangat besar sekali, dimana 1 guru pns menangani 144 siswa seperti di kabupaten lebak. Ini pekerjaan rumah yang berat bagi menteri pendidikan baru yang punya visi pendidikan kearah keterampilan. Untuk melihat ratio secara keseluruhan guru dan siswa, disajikan seperti grafik berikut ini:

GRAFIK 1.8
SPESIFIKASI GURU – SISWA MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN



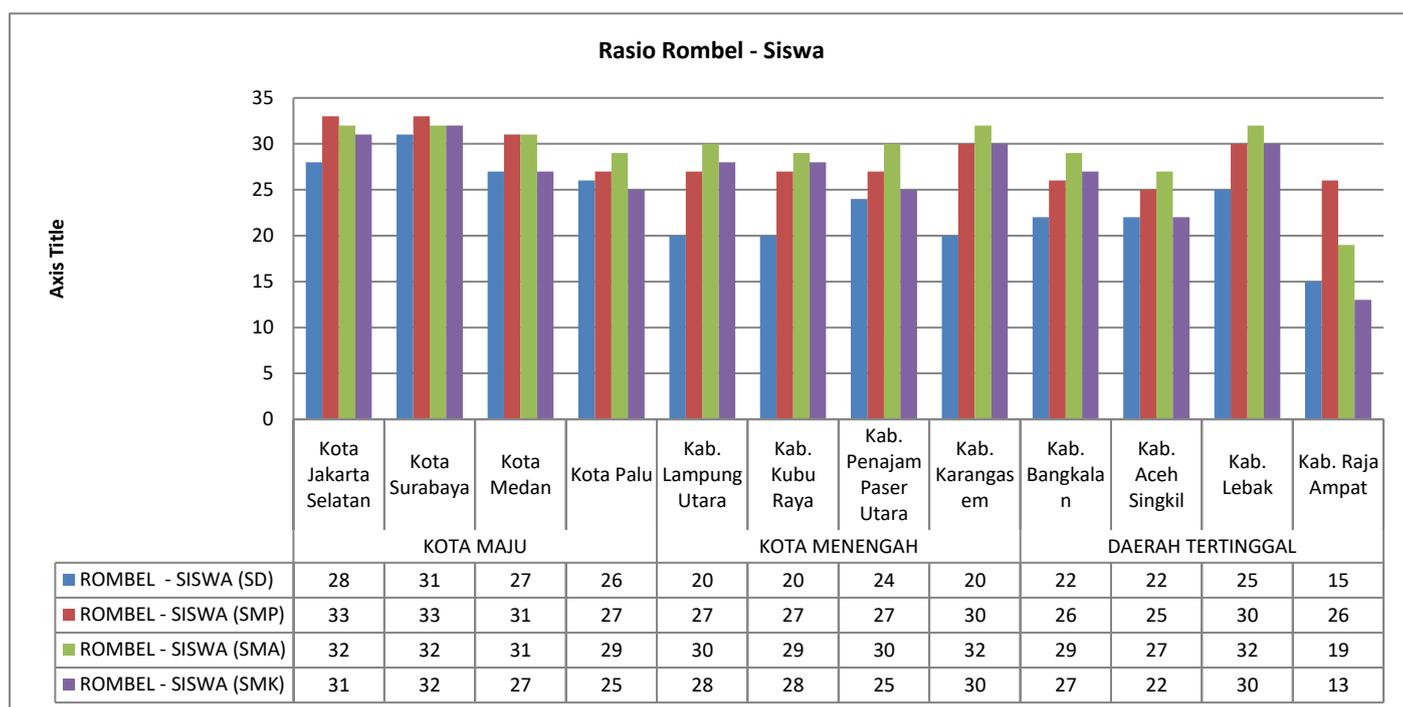
Ratio guru dan siswa secara keseluruhan ini sangat ideal, dimana khusus guru SD saja memiliki ratio 1 guru berbanding 20 siswa, guru SMP memiliki rata-rata ratio 1 guru berbanding 17 siswa, guru SMA memiliki rata-rata rasio 1 guru berbanding 16 siswa dan guru SMK memiliki rata-rata 1 guru berbanding 15 siswa. Untuk lebih jelasnya tiap kabupaten/kota disajikan data seperti grafik dibawah ini:

GRAFIK 1.9
RASIO GURU DAN SISWA SECARA KESELURUHAN



Grafik diatas menunjukkan Ratio guru secara keseluruhan, baik guru PNS maupun guru swasta yang ada di kabupaten/kota obyek analisis. Ratio yang paling tinggi adalah kota Surabaya dan Kabupaten Lebak, ini menunjukkan ketersediaan guru yang minim disuatu daerah. Selain data guru dan siswa juga kita akan melihat data rombongan belajar, data ini tersajikan seperti grafik berikut ini:

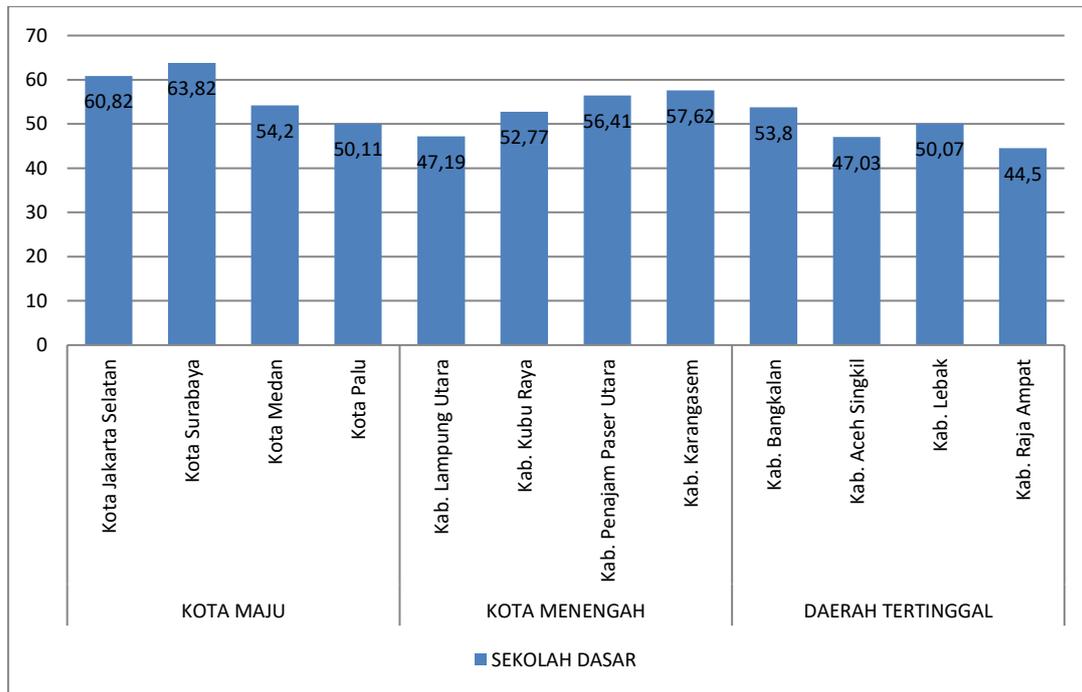
**GRAFIK 1.10
RASIO ROMBEL**



Ratio guru dan ratio rombel ini bisa disandingkan, apakah daerah yang sedikit gurunya apakah memiliki rombel yang banyak. Data diatas menunjukkan bahwa rata-rata rombel SMA lebih tinggi dari rombel SD, begitupun rombel SMP dan SMK. Rombel SMA dari dua belas kabupaten kota rata-rata 1 rombel 29 siswa, sedangkan rombel SD terdiri dari 23 siswa dalam 1 rombel. Sedangkan kota maju yang memiliki siswa dalam satu rombel yaitu kota Surabaya sebesar 32 siswa, dan kedua kota Jakarta selatan dengan 31 siswa, sedangkan yang paling sedikit siswanya yaitu kabupaten raja empat sejumlah 18 siswa dalam 1 rombel.

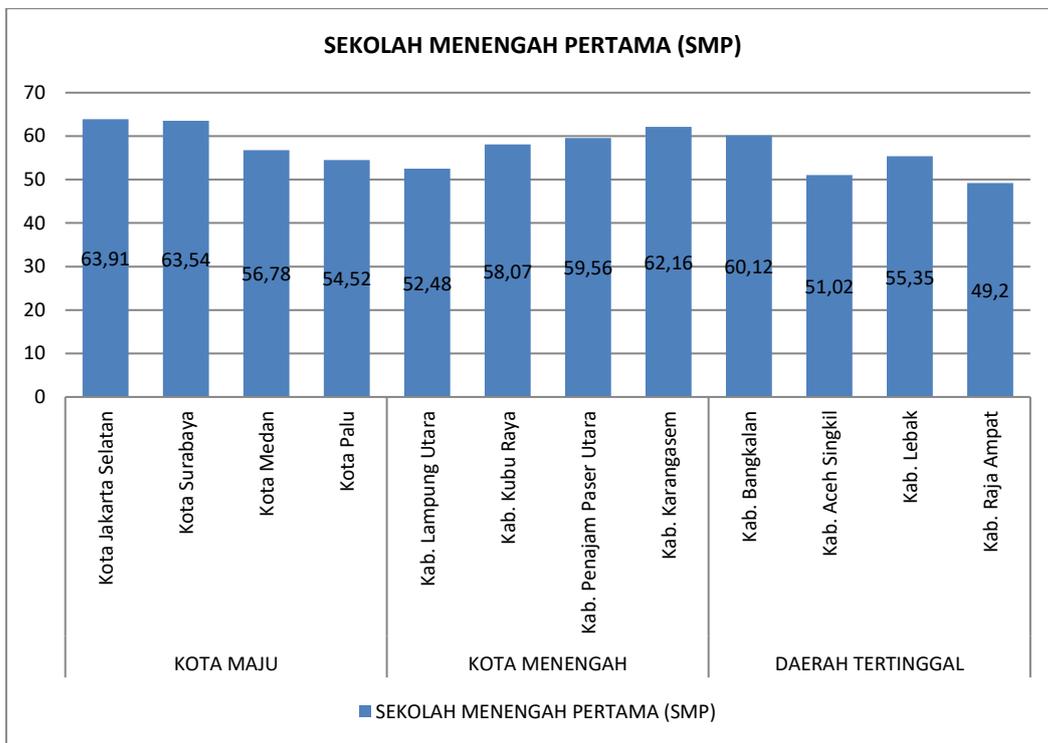
Setelah dijelaskan data kualifikasi guru, ratio guru dan jumlah siswa dalam rombongan belajar, maka dijelaskan juga uji kompetensi guru (UKG) di dua belas kabupaten/kota obyek analisis. Akan dimulai dari data uji kompetensi guru pada jenjang pendidikan sekolah dasar seperti pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 1.11
UJI KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR



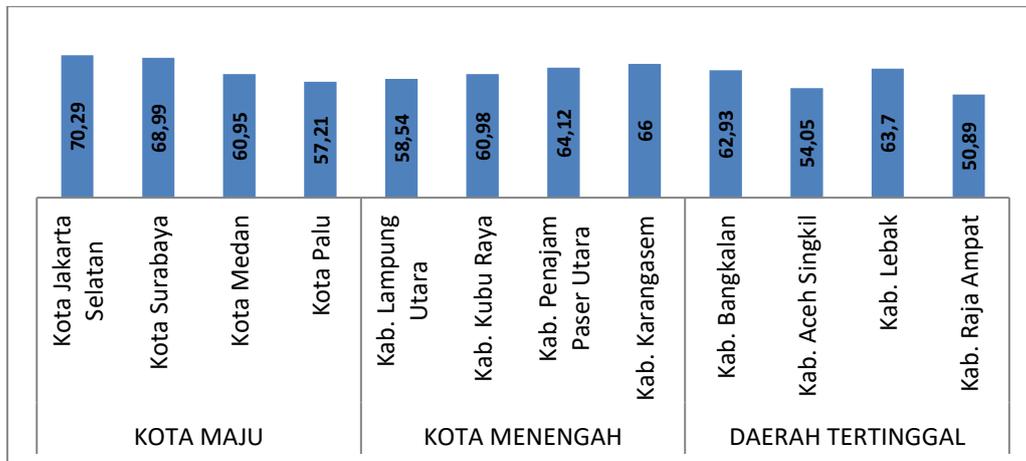
Grafik Uji Kompetensi Guru (UKG) diatas menjelaskan guru sekolah dasar memiliki kompetensi rata-rata 53,2, baik dari sekolah yang ada di kota maju maupun kota berkembang dan daerah tertinggal. Nilai rata-rata ini tidak mencapai nilai harapan standar kelulusan UKG Nasional sebesar 75. Kabupaten yang memiliki UKG paling rendah adalah Raja Ampat sebesar 44,5 sangat jauh 31 poin dari standar kelulusan nasional. Sedangkan untuk UKG sekolah menengah pertama dapat dilihat pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1.12
UJI KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



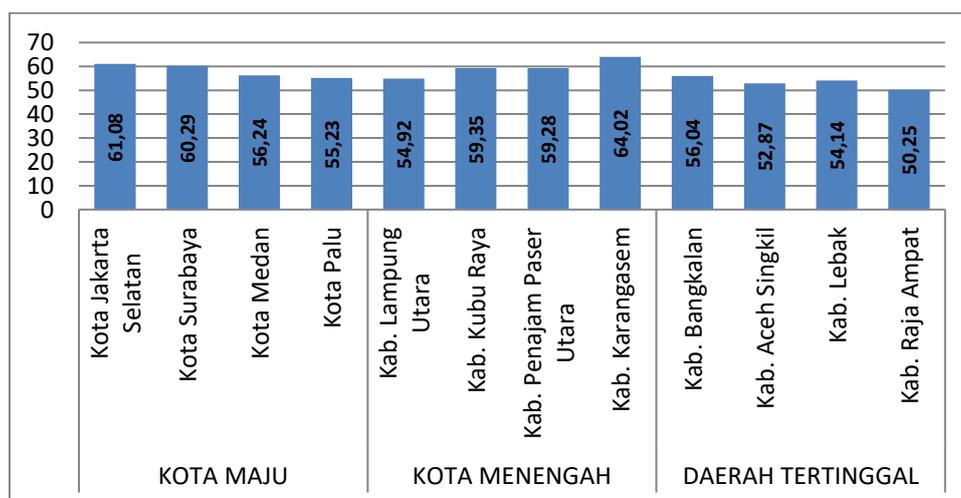
Grafik Uji Kompetensi Guru (UKG) diatas menjelaskan guru sekolah menengah pertama memiliki kompetensi rata-rata 57,2 naik 7 poin dari UKG SD, hasil UKG tersebut diperoleh dari nilai rata-rata pada sekolah yang ada di kota maju, kota menengah dan daerah tertinggal. Nilai rata-rata ini tidak mencapai nilai harapan standar kelulusan UKG Nasional sebesar 75. Adapun kabupaten yang memiliki nilai UKG yang buruk yaitu kabupaten Raja Ampat dengan nilai 49,2. Atau 26 poin lebih rendah dari standar nasional. Buruknya nilai UKG ini menjadi Faktor yang memperlambat capaian belajar bagi siswa di suatu kabupaten/kota. Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas, hasil UKG dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

GRAFIK 1.13
UJI KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS



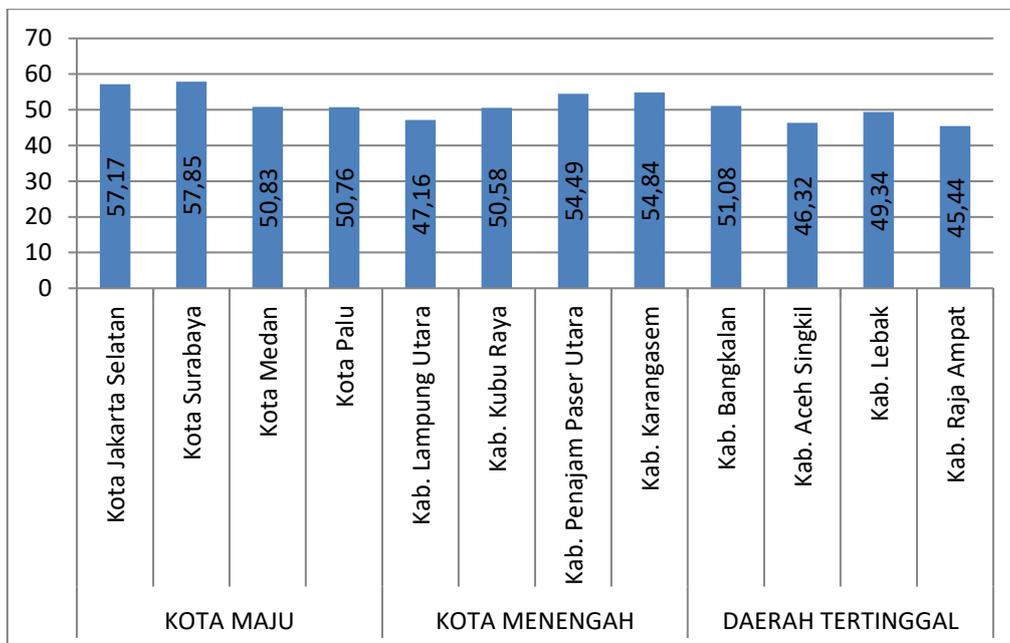
Grafik uji kompetensi guru sekolah menengah atas diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun kabupaten/kota di tiga area pembagian yang mampu menembus angka standar nasional, jika dirata-ratakan dari 12 kabupaten/kota tersebut hanya sebesar 62 poin, namun ada yang lebih tinggi dari yang lainnya yaitu kota Jakarta selatan, sebesar 70,29 poin, sedangkan yang paling rendah yaitu kabupaten raja ampat dengan poin 50,89 atau kurang 24,11 poin dari standar nasional. Hal yang menari dilihat adalah kabupaten lebak mampu mencapai 63,7 poin atau kurang 11,3 poin dari standar nasional, padahal dari sisi perbandingan ratio guru PNS dengan siswa kabupaten lebak 1:73 siswa. Selain data hasil UKG sekolah menengah atas, juga disajikan hasil UKG Guru Menengah Kejuruan, seperti pada grafik berikut ini:

GRAFIK 1.14
UJI KOMPETENSI GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Data Uji Kompetensi Guru Sekolah Menengah Kejuruan diatas menunjukkan hampir sama dengan data UKG SMA, dimana rata-rata UKG dari 12 kabupaten/kota obyek analisis sebesar 57 poin atau hampir sama dengan hasil UKG SMP, Uji Kompetensi Guru SMK ini terdapat kabupaten/kota yang tinggi nilai poin nya yaitu kabupaten Karangasem sebesar 64,02 poin, atau sedikit lebih tinggi dari kota Jakarta selatan. Sedangkan yang paling rendah itu masih bertengger pada kabupaten Raja Ampat yang hasil UKG nya sebesar 50,25 poin atau kurang 24,75 poin dari target nasional. Selain hasil UKG secara keseluruhan, perlu disampaikan hasil UKG khusus kompetensi Pedagogik seperti pada grafik berikut ini:

**GRAFIK 1.15
UKG PEDAGOGIK**



Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi yang diajarkan tersebut dalam kelas. Grafik diatas menunjukkan bahwa daerah tertinggal memiliki rata-rata hasil Uji kompetensi Pedagogik yang paling rendah dengan nilai 53, ketimbang kota menengah yang memiliki hasil 59 poin. Daerah yang paling rendah nilai kompetensi guru khusus pedagogik yaitu Kabupaten Raja Ampat dengan nilai 45,44 poin, atau kurang 29,56 poin.

C. PENUTUP

Persoalan Guru ini sangat kompleks, dimana masih banyaknya daerah yang memiliki guru berkualifikasi dibawah DIV/S1, juga masih tingginya ratio guru dengan siswa bahkan di kabupaten lebak terdapat perbandingan 1:73, selain itu rata-rata guru di daerah obyek analisis dalam uji kompetensinya tidak mencapai standar nasional yang dipatok 75 poin, atau rata-rata berkisar 57 poin, ini menandakan guru di Indonesia selain kurang juga memiliki kualitas yang dibawah standar.